

GAGASAN OPTIMALISASI KERJA SAMA PELESTARIAN ARSIP PURO PAKUALAMAN

Rina Rakhmawati¹ Titi Susanti² Arif Rahman Bramantya³

^{1,2,3}Program Studi D3 Kearsipan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Email: ¹rinaarsip13@gmail.com

Email: ²titisusanti@ugm.ac.id

Email: ³arif_bramantya@yahoo.com

ABSTRAK

Arsip Puro Pakualaman merupakan salah satu kekayaan khazanah budaya Indonesia. Arsip puro menjadi identitas keistimewaan Yogyakarta sekaligus rekam jejak peran Puro Pakualaman bagi Indonesia. Karakter khas arsip Puro Pakualaman ada pada 2 (dua) aspek, yaitu aspek bahasa dan tulisan, dan aspek konten. Dalam aspek bahasa dan tulisan, arsip-arsip puro memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu Belanda, Melayu, dan Arab Pegon. Pada aspek konten, arsip puro didominasi permasalahan pendidikan, sosial, dan hukum. Pengelolaan arsip puro dilakukan secara partnership atau kerja sama antar lembaga. Pada mulanya, partnership dilakukan antara pihak puro dengan Arsip Nasional RI. Setelah terbentuk lembaga kearsipan di tingkat daerah, pengelolaan arsip secara partnership dilakukan antara pihak puro dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini mengacu pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY. Penulis, dalam kajian ini, mendeskripsikan dinamika dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan arsip Puro Pakualaman berbasis partnership. Penulis menggunakan 3 (tiga) metode penelitian dalam mengkaji permasalahan, yaitu: kajian pustaka, observasi partisipasi, dan wawancara tidak terstruktur. Simpulan dari kajian ini adalah optimalisasi partnership pengelolaan arsip puro, yaitu perluasan jejaring kerja sama dengan dunia Internasional dalam bentuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia pengelola.

Kata kunci : arsip, puro pakualaman, kerja sama, optimalisasi

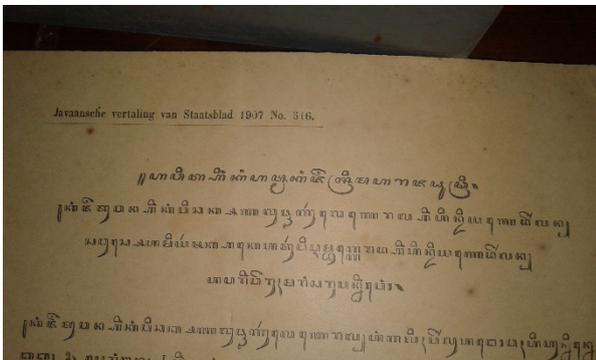
PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan salah satu daerah administratif Indonesia yang memiliki karakter istimewa. Kunci utama untuk memahami keistimewaan Yogyakarta, salah satunya, melalui keberadaan Puro Kadipaten Pakualaman. Kadipaten Pakualaman merupakan tata pemerintahan berbentuk kerajaan dengan pusat kekuasaan pada seorang raja bergelar Adipati Paku Alam. Pakualaman juga menjadi sebuah kerajaan yang merdeka, dengan kata lain, tidak berada di bawah kekuasaan Kasultanan.

Pakualaman memiliki peran yang dominan dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, peradilan, dan perekonomian rakyat. Berbagai kegiatan yang mencerminkan peran Pakualaman direkam dalam arsip. Sebagian besar pakar kearsipan berbeda pendapat terkait arsip dan manuskrip. Miller (1990) menyebutkan bahwa arsip berbeda dengan manuskrip. Menurut Miller, ... *archives are the noncurrent but still useful records of an organization or institution preserved by that organization or institution*. Arsip, menurut pendapat Miller, meski tidak lagi memiliki nilai

guna administratif, namun masih memiliki nilai guna kebudayaan dan identitas suatu organisasi atau institusi. Oleh karena itu, arsip tersebut dikelola oleh organisasi atau institusi penciptanya. Manuskrip, Miller (1990) menegaskan, adalah ... *the records created or gathered by an organization or individual but transferred from the original custodian to a collecting repository, such as a local historical society or university library*. Library Research Skills Tutorial of University of London (UL-LRST) memberikan pemahaman komprehensif bahwa *archives are records that have been retained for their historical, legal or functional value. Archives can include documents created in paper, audio-visual, or electronic form. They are usually well structured according to the administrative principles of the creating organization or person*. Manuskrip, UL-LRST menambahkan, sebagai ... *do not have structured and hierarchical arrangements, can include items that are later published, often single documents, and medium of transmission varies depending on the origin and date of creation (papyrus, vellum or parchment, paper or electronic)*. Namun demikian, UL-LRST

juga menegaskan manuskrip dapat dikategorikan sebagai arsip personal. Pendapat tersebut digunakan di sebagian besar wilayah Amerika. Hal ini dapat dilihat pada beberapa proyek kerja sama pelestarian arsip di Mali dan Australia, dengan objek manuskrip Timbuktu dan arsip Suku Aborigin. Pertentangan pendapat terkait perbedaan arsip dan manuskrip tidak dirasakan begitu jelas dalam pelestarian arsip Puro Pakualaman. Dalam praktik pengelolaan yang dilakukan BPAD DIY, arsip Puro Pakualaman mengacu pada naskah persuratan, laporan peradilan atau berita acara pengadilan, foto dan peta sebagai rekam jejak fungsi Pakualaman sebagai lembaga pemerintahan.



Gambar 1. Arsip Salinan *Staatblad* dalam Bahasa dan Tulisan Jawa
Sumber: Dokumen pribadi

Menurut Margono (2011), arsip-arsip Puro Pakualaman memiliki keistimewaan dibandingkan arsip-arsip Kasultanan. Keistimewaan tersebut terletak pada isi informasi yang berupa persoalan-persoalan sosial masyarakat, yaitu lapisan menengah ke bawah. Selain itu, bahasa dan penulisan isi informasi tidak hanya berbahasa Indonesia, tetapi juga Belanda, Arab, dan Jawa. Suhardo (2016), arsiparis ahli BPAD DIY dalam sebuah wawancara singkat, menyatakan bahwa meskipun arsip Puro Pakualaman merupakan arsip kelembagaan, namun arsip tersebut juga memiliki sifat sebagai arsip pribadi. Hal tersebut dapat dilihat pada kewenangan yang diberikan kepada BPAD DIY hanya sebatas pada pengolahan arsip. BPAD DIY tidak diberi kewenangan untuk menyimpan arsip, sehingga arsip-arsip Puro Pakualaman tetap dipertahankan di lingkungan internal Puro Pakualaman. Kondisi demikian berdampak signifikan terhadap kegiatan pelestarian arsip Puro Pakualaman.

Pelestarian arsip merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan arsip statis atau arsip bernilai sejarah. Pelestarian arsip identik dengan istilah preservasi arsip. Dalam *Terminologi Kearsipan Nasional*, pelestarian atau preservasi arsip adalah perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak (Hadiwijaya, 2002). Pelestarian arsip juga diidentikkan dengan kegiatan konservasi atau perbaikan fisik arsip (McKenzi, 1996). Namun, menurut *The Australian Institute for The Conservation of Cultural Material* (AICCM) menegaskan bahwa kegiatan preservasi dan konservasi tidak dapat dibedakan dengan tegas (Bettington, 2008). Oleh karena itu, makna pelestarian arsip diarahkan pada upaya perlindungan dan perbaikan fisik arsip dari kerusakan atau unsur perusak. Kegiatan pelestarian arsip di Puro Pakualaman meliputi beberapa kegiatan, yaitu penataan arsip, restorasi, fumigasi, inventarisasi, dan digitalisasi. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak Puro Pakualaman, tetapi bekerja sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kerja sama tersebut dilakukan mengingat keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga ahli kearsipan yang mampu mengelola arsip sesuai standar kearsipan.

Pada dasarnya, kerja sama pelestarian arsip bukanlah hal yang asing. Kerja sama yang dilakukan lembaga kearsipan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 37 ayat (1) dan (2) bahwa lembaga kearsipan dapat mengadakan kerja sama dengan pencipta arsip hingga kerja sama internasional. Hal tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa (Azmi, 2012). Kerja sama pelestarian arsip juga telah dilakukan di berbagai negara, misalnya Mali melalui *Timbuktu Manuscripts Project* dan Australia (*The Ara Irititja Project* dan *The Mulka Project*). Kerja sama yang dilakukan Puro Pakualaman dan BPAD DIY telah dilakukan sejak 1987. Hasil pengelolaan arsip Puro Pakualaman berupa beberapa terbitan buku naskah sumber, misalnya *Peran Kadipaten Pakualaman di Bidang Ekonomi dan Pendidikan Sebelum Tahun 1950* dan *Konteks Historis-Sosiologis Sengketa Hukum di Kadipaten Pakualaman Pada Masa Kolonial*. Upaya mengalih-mediakan arsip-arsip tekstual menjadi bentuk *digital* juga terus dilakukan sebagai langkah memudahkan akses pengguna.

Namun demikian, kerja sama yang telah berjalan dinilai belum mampu memaksimalkan pemanfaatan arsip Puro Pakualaman. Hal ini dapat dijumpai dalam pernyataan salah satu *tour guide* Museum Puro Pakualaman yang menjelaskan bahwa belum ada peneliti yang tertarik untuk membedah arsip silsilah keluarga Pakualaman sejak zaman Nabi Adam yang tersimpan di Museum Puro Pakualaman. Salah satu arsiparis ahli di BPAD DIY pun memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda bahwa arsip tentang hukum peradilan belum banyak menarik minat peneliti. Minimnya sosialisasi mengenai arsip Puro Pakualaman juga berdampak pada kurangnya perhatian dari para pemangku kebijakan terhadap pelestarian arsip Puro Pakualaman. Ketersediaan anggaran yang tidak dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan sarana prasarana menjadi alasan utama kurang optimalnya pelestarian arsip Puro Pakualaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk memaparkan gagasan optimalisasi kerja sama dalam pelestarian arsip di Puro Pakualaman. Hal ini mengingat keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) yang digunakan untuk program pelestarian arsip, ternyata belum mampu menambah nilai manfaat bagi publik. Kepala BPAD DIY, Budi Wibowo, dalam pemberitaan media, menyebutkan bahwa alokasi untuk pelestarian arsip berupa digitalisasi arsip, dari Danais akan disediakan. Keberadaan Danais diharapkan mampu mengoptimalkan kerja sama dalam melestarikan arsip Puro Pakualaman sehingga tidak hanya bermanfaat secara aspek keilmuan, tetapi juga penjaga identitas keistimewaan Yogyakarta dan penumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud menjelaskan gagasan mengenai optimalisasi kerja sama dalam pelestarian arsip di Puro Pakualaman (Wright, 1971). Penelitian dilakukan di Puro Pakualaman dan BPAD DIY. Makalah ini difokuskan pada persoalan kerja sama yang telah dilakukan antara Puro Pakualaman dan BPAD DIY dalam upaya pelestarian arsip-arsip bernilai sejarah di Puro Pakualaman. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan primer antara lain

melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan arsiparis yang membantu dalam kegiatan pelestarian arsip di Puro Pakualaman. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moeloeng, 2004). Menurut Yin R.K. (2003), triangulasi membutuhkan tiga data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (studi literasi).

PEMBAHASAN

Best Practiced Kerja Sama Pelestarian Arsip di Mali, Australia, dan Anri

Kerja sama dalam pelestarian warisan budaya, khususnya arsip, telah dilakukan sejak masa paska Perang Dunia II. Kerja sama tidak hanya diperankan dalam skala nasional, tetapi juga melibatkan dunia internasional, terutama di negara-negara bekas kolonial. Dong (2013) menyebutkan bahwa negara-negara industri dan organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang preservasi memberikan banyak bantuan berupa dana, teknologi, dan teknik preservasi yang berkualitas. Pelestarian arsip dengan melibatkan aktor internasional, sebagaimana terjadi di ANRI, Mali, dan Australia, berdampak tidak hanya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada aspek politik dan sosial ekonomi. Parker dan Sloggett (2011) menyebutkan bahwa *archives such as those in historical institutions, including museums, government agencies and national archives, offer information that supports the construction of personal and community identity and the social life and shared memories of communities*. Arsip, dimaknai oleh Parker dan Sloggett sebagai bagian dari pembangunan jati diri individu maupun identitas suatu komunitas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, arsip juga dimaknai sebagai memori kolektif sebuah peradaban bangsa. Arsip, di era globalisasi saat ini, diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam membangun masyarakat tanpa harus kehilangan akar identitasnya.

Studi kasus kerja sama pelestarian arsip yang dilakukan ANRI, Mali, dan Australia merupakan *best practiced* yang menarik untuk dipahami. Hal ini karena kegiatan pelestarian arsip tidak hanya melibatkan 2 (dua) aktor, tetapi hingga 5 (lima) aktor

lintas negara. Selain itu, arsip yang menjadi objek pelestarian tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak peradaban suatu bangsa, pengukuh identitas pencipta arsip, tetapi juga diupayakan mampu mendorong perekonomian kreatif berbasis budaya lokal. Keterkaitan arsip dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dalam kegiatan pelestarian arsip. Dengan demikian, pelestarian arsip yang membutuhkan anggaran tinggi dapat memiliki hasil yang nyata dan bermanfaat secara luas.

Kerja sama pelestarian arsip di Mali atau *Timbuktu Manuscripts Project* (TMP) dimulai pada tahun 2000 (Dong, 2011). Adapun arsip yang menjadi objek pelestarian adalah arsip-arsip kawasan Timbuktu. Tujuan penyelenggaraan proyek kerja sama internasional tersebut, sebagaimana dikutip oleh Dong (2011), adalah *to preserve and promote wide access to the invaluable cultural and literary heritage held in both public and private collections of manuscripts in the Timbuktu area*. Artinya, arsip-arsip yang dilestarikan tersebut tidak hanya berupa arsip pribadi, tetapi juga arsip publik. Aktor utama dalam pelestarian arsip Timbuktu adalah Institut Ahmed Baba dan Kementerian Pendidikan Mali. Aktor-aktor internasional yang dilibatkan dalam proyek kerja sama pelestarian arsip Timbuktu, antara lain *National Research Council of Mali*, UNESCO, *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD), *the Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD), dan *Northwestern University* di Evanston, Illinois. Metode pelestarian arsip yang digunakan dalam TMP adalah digitalisasi atau alih media arsip. Meski demikian, Mali menghadapi beberapa kendala dalam proyek digitalisasi arsip-arsip Timbuktu. *Pertama*, keterbatasan infrastruktur, yaitu minimnya jaringan listrik dan internet untuk mengakses arsip-arsip hasil digitalisasi. Keterbatasan tersebut juga sebagai akibat dari kondisi geografis Mali sebagai negara berkembang. *Kedua*, multi-konsep bukti sejarah dan kultural bangsa. Dong (2011) menjelaskan bahwa beberapa akademisi memberikan label bahwa Afrika tidak memiliki sejarah lokal yang menjadi penguat identitas ke-Afrika-annya. Hal tersebut didasarkan pada konsep awal UNESCO yang tidak mengkategorikan sejarah lisan sebagai bagian dari bukti sejarah suatu peradaban. Oleh karena itu, proyek TMP menjadi upaya awal untuk memahami sejarah

lokal Afrika melalui arsip yang berhasil ditemukan. *Ketiga*, adanya benturan kepentingan lokal dan global. Arsip Timbuktu, dalam konteks lokal, dimaknai sebagai bukti identitas peradaban Mali. Oleh karena itu, perlu diberlakukan perlindungan agar tidak mudah rusak dan/atau hilang, salah satunya melalui pembatasan akses. Kebijakan pembatasan akses, pada dasarnya, diperlukan untuk menjaga fisik dan isi informasi arsip dari berbagai ancaman. Namun pembatasan akses tersebut menjadi melemah relevansinya apabila diberlakukan terlalu ketat. Pembatasan akses, dalam konteks proyek TMP, diberlakukan tidak hanya bagi penduduk asli Mali, tetapi juga akademisi non-Mali yang ingin menggali sejarah peradaban Mali. Kebijakan tersebut menjadi berseberangan dengan tujuan awal dari proyek TMP, yaitu mempermudah akses arsip-arsip Timbuktu sehingga dapat menjadi referensi utama membangun perekonomian berbasis budaya lokal. Ketiga kendala tersebut menjadi materi evaluasi terhadap keberlanjutan proyek TMP tersebut.

Australia, sebagaimana Mali, juga melakukan proyek digitalisasi arsip. Arsip milik Suku Aborigin, penduduk asli benua Australia, menjadi objek proyek digitalisasi. *The Ara Irititja Project* menjadi proyek digitalisasi berbasis *website* sehingga disebut "*living archive*" (Parker & Sloggett, 2011). Proyek tersebut telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak di Australia dan melibatkan warga Suku Aborigin dalam implementasinya. *The Mulka Project* merupakan proyek yang melestarikan arsip-arsip komunitas Aborigin Yirrkala yang berada di institusi publik dan swasta, tetapi juga mendokumentasikan aktivitas-aktivitas lokal kekinian. Keberadaan proyek tersebut tidak hanya sebagai pusat dokumentasi, tetapi juga memanfaatkan dokumen hasil digitalisasi sebagai penguatan ekonomi lokal (Lane dalam Parker & Sloggett, 2011).

Proyek-proyek digitalisasi arsip Suku Aborigin tersebut tidak murni tanpa kendala dan tantangan. *Pertama*, para profesional kearsipan di Australia perlu memikirkan strategi agar Suku Aborigin dapat mengelola arsip-arsipnya secara mandiri. Pendekatan *training* atau pelatihan kearsipan menjadi hal yang krusial untuk direncanakan jangka panjang (Williams dalam Parker dan Sloggett, 2011). Hal ini mengingat minimnya Suku Aborigin yang memahami tata kelola arsip.

Kedua, tantangan untuk memberdayakan generasi muda Suku Aborigin dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang teknologi internet. Kendala dan tantangan tersebut dapat sukses dihadapi apabila Australia membuat kebijakan nasional yang tepat bagi Suku Aborigin agar mampu mengelola arsipnya secara mandiri dan profesional. Pengelolaan arsip dalam media digital merupakan kegiatan yang kompleks sehingga dibutuhkan *platform* yang kuat dan komprehensif. Pelatihan kearsipan yang diselenggarakan bagi Suku Aborigin haruslah sesuai dengan siklus manajemen kearsipan, yaitu sejak alih media hingga pelestarian. Selain itu, dalam perencanaan hingga implementasinya, tidak hanya melibatkan pemerintah Australia dan Suku Aborigin, tetapi juga sektor industry untuk memperkuat dalam hal pengembangan teknologi informasi (Parker dan Sloggett, 2011).

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selaku koordinator penyelenggaraan kearsipan nasional, juga telah melaksanakan proyek digitalisasi arsip-arsip masa pemerintahan VOC. Proyek digitalisasi *Sejarah Nusantara* merupakan proyek digitalisasi perdana ANRI yang bekerja sama dengan Yayasan Cortis (Belanda). Adapun objek proyek digitalisasi tersebut adalah arsip-arsip VOC pada abad ke 17 dan abad ke 18. Arsip-arsip tersebut, sebelum dilakukan digitalisasi, dipilah

terlebih dahulu sehingga dapat mengungkapkan sejarah nusantara dan lokal, pada khususnya, yang direkam dalam arsip-arsip VOC (Irawan dan Niemeijer, 2013). Mustari Irawan dan Hendrik E. Niemeijer, dalam kata pengantar *website* 'Sejarah Nusantara' menyebutkan bahwa arsip-arsip yang berhasil didigitalisasi tersebut masih belum banyak dimanfaatkan oleh para akademisi. Proyek tersebut tidak hanya berhasil meng-alih mediakan arsip-arsip VOC yang terancam rusak, tetapi juga memaparkan artikel-artikel menarik yang membahas isi informasi dari beberapa arsip yang berhasil dialih-mediakan. Proyek tersebut, berbeda dengan Mali dan Australia, tidak diperlihatkan tujuan selain pemanfaatan untuk penelitian akademik. Oleh karena itu, dampak secara langsung terhadap daerah yang disebut dalam arsip-arsip yang telah didigitalisasi tersebut pun belum dapat dipaparkan dengan jelas. Proyek digitalisasi arsip VOC tersebut masih memerlukan kajian mendalam agar terlihat jelas kebermanfaatannya, selain sebagai sumber penelitian akademik.

Kerja Sama Pelestarian Arsip di Puro Pakualaman

Arsip Puro Pakualaman merupakan aset berharga dan memiliki kontekstualitas tinggi terhadap status keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, pelestarian arsip Puro Pakualaman menjadi hal yang mutlak diperlukan agar keistimewaan Yogyakarta



Gambar 2 Ruang Simpan Arsip di Puro Pakualaman
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 3 Bentuk Kerusakan Arsip di Puro Pakualaman
Sumber: Dokumen pribadi

tetap eksis. Hasil penelitian yang dilakukan Risty Styra Nur Novita dkk. (2008) menyebutkan bahwa pengelolaan arsip Puro Pakualaman dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa arsip belum dikelola secara sistematis sehingga banyak arsip yang hilang dan rusak. Selain itu, arsip Puro Pakualaman juga belum dapat dimanfaatkan secara luas. Hal ini disebabkan (Novita dkk., 2008):

1. Masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan arsip statis di Puro Pakualaman;
 2. Adanya kendala kultural karena sebagian besar masyarakat berpikir bahwa Puro Pakualaman merupakan institusi yang tertutup dan mistik;
 3. Penguasaan tulisan dan bahasa sumber yang masih minim di kalangan pengguna, khususnya mahasiswa dan peneliti.
1. Pemeliharaan gedung, kondisi fisik gedung penyimpanan arsip dalam kondisi kokoh dan jauh dari bahaya bencana. Meski sarana AC dan alat ukur kelembaban udara telah disediakan melalui dana keistimewaan, namun sarana AC tidak berfungsi dengan baik (Suhardo, 2016). Hal ini menyebabkan suhu dan kelembaban belum dapat diatur sesuai standar penyimpanan arsip.
 2. Pengaturan cahaya, masih minim sehingga keadaan ruang simpan gelap dan pengap.
 3. Ruang simpan arsip jarang dibersihkan dari debu, meski demikian, arsip telah disimpan dalam kertas *kissing* dan box arsip sehingga menjamin keselamatan fisik arsip.
 4. Alih media atau digitalisasi, sampai saat ini telah dilakukan sekitar 50% arsip (Suhardo, 2016)
 5. Pemeliharaan dengan cara tradisional, misalnya pemberian kamper, kapur gamping (agar udara tidak lembab), dan akar *lorosetu* (pengawetan bahan arsip).

Pelestarian arsip statis dilakukan karena sebagian besar arsip puro dalam kondisi yang rusak dan rapuh. Faktor yang dominan menjadi perusak arsip di Puro Pakualaman adalah faktor usia arsip dan minimnya perawatan. Pada faktor minimnya perawatan, kerusakan yang terjadi karena faktor biologis (jamur atau *foxing* atau bintik-bintik coklat pada kertas), faktor fisika (perubahan suhu dan kelembaban yang tidak teratur), dan faktor manusia (penggunaan dengan mesin *fotocopy*). Kegiatan pelestarian arsip yang dilakukan di Puro Pakualaman terdiri dari:

Berdasarkan kondisi tersebut dan adanya kewajiban lembaga kearsipan untuk mengelola arsip statis sebagaimana amanat dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan), maka dilakukan kerja sama antara Puro Pakualaman dengan Pemerintah DIY. Kerja

sama dilaksanakan sejak tahun 1987, bersama dengan Keraton Yogyakarta. Puro Pakualaman, dalam kerja sama tersebut, berkedudukan sebagai pemilik arsip (institusi pencipta arsip), sedangkan Pemerintah DIY (diwakili Kantor Arsip Daerah DIY, saat itu) sebagai pengelola arsip. Kerja sama tersebut dilakukan juga dilandasi oleh ketiadaan abdi dalem puro yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kearsipan.

Kegiatan pelestarian arsip di Puro Pakualaman juga mendapat bantuan dari pihak Arsip Nasional RI (ANRI) melalui kerja sama ANRI dengan Pemerintah DIY. Adapun bentuk bantuan tersebut, antara lain (Novita dkk., 2008):

1. Memberikan metode atau sistem yang tepat untuk dapat digunakan sebagai basis pengelolaan arsip statis;
2. Pengiriman tenaga ahli;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip statis.

Metode digitalisasi atau alih media arsip menjadi fokus utama dalam pelestarian arsip puro pasca dana keistimewaan ditetapkan. Namun, arsip-arsip hasil digitalisasi hanya dapat diakses secara menyeluruh melalui komputer internal di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah (BPAD) DIY (Suhardo, 2016). Selain digitalisasi, dana keistimewaan juga digunakan untuk melatih para abdi dalem agar mampu membantu merawat arsip di Puro Pakualaman sesuai dengan standar kearsipan.

Optimalisasi Kerja Sama dalam Pelestarian Arsip di Puro Pakualaman

Kerja sama pelestarian arsip yang dilakukan oleh Puro Pakualaman dan BPAD DIY telah memasuki usia 29 tahun. Berbagai perubahan metode pelestarian juga telah dilakukan dalam rangka penyelamatan arsip puro yang menjadi identitas keistimewaan Yogyakarta. Namun demikian, kerja sama tersebut masih dinilai belum mampu memaksimalkan potensi arsip Puro Pakualaman. Hal ini dapat diperhatikan pada komponen sarana dan prasarana pelestarian dan publikasi khasanah arsip. Optimalisasi kerja sama pelestarian arsip Puro Pakualaman mutlak diperlukan.

Metode digitalisasi merupakan metode yang efektif dan efisien dalam pemeliharaan arsip. Metode digitalisasi arsip dapat terlihat hasilnya apabila pengguna dapat mengakses arsip tanpa

harus melalui komputer internal BPAD DIY. Portal *Sejarah Nusantara* yang dikelola oleh pihak ANRI atas kerja sama dengan Yayasan Cort dapat menjadi contoh. Arsip hasil digitalisasi dapat diakses oleh publik secara luas dan tematik sehingga publik lebih mudah menelusuri arsip yang dibutuhkan. Apabila BPAD DIY belum memiliki ahli komputer maupun desain grafis, Pemerintah DIY dapat memanfaatkan pihak ketiga untuk membuat portal khusus yang menampilkan arsip-arsip Puro Pakualaman hasil digitalisasi. Aspek keamanan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dalam memilih pihak ketiga sebagai *partner* kerja sama dalam pengelolaan arsip-arsip hasil digitalisasi.

Selain itu, berkaca pada studi kasus kerja sama di Mali dan Australia, digitalisasi arsip tidak hanya sebagai upaya pelestarian arsip. Apabila arsip Puro Pakualaman hasil digitalisasi dapat diakses secara lebih mudah dan luas oleh publik, maka persepsi Puro Pakualaman yang tertutup dan mistik akan pudar. Hal senada disampaikan Lyndon Ormond-Parker dan Robyn Sloggett (2011) bahwa:

Digitized material is often provided to communities to assist with community development, help families build genealogies, provide information for land rights claims, reinvigorate traditional knowledge systems and other activities where information can assist in cultural, financial or legal restitution. Digitized material is also created within communities as part of education, health, social, art, tourism and community projects, to name but a few.

Sarana dan prasarana yang masih minim dapat dimaksimalkan melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. *Best practiced* dari ANRI, Mali, dan Australia menjadi contoh yang dapat diadaptasi. Kesadaran bahwa arsip Puro Pakualaman memiliki kekayaan informasi bersejarah terkait keistimewaan Yogyakarta dari aspek sosial politik, serta keunikan bahasa dan tulisan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan kerja sama dengan pihak Internasional. Kerja sama dalam hal sarana dan prasarana dapat berupa peminjaman sarana pelestarian arsip maupun penyempurnaan metode pelestarian agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang terdampak oleh *global warming*.

Puro Pakualaman telah memiliki metode pelestarian tradisional yang dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan fisik arsip. Namun demikian, pengembangan metode berbasis budaya lokal tersebut masih minim. Pengembangan metode pelestarian berbasis budaya lokal melalui kerja sama juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia yang justru semakin merusak alam dan tidak selaras dengan program *go green*. Kerja sama dalam hal ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang memiliki studi kearsipan dan studi kimia berbasis lingkungan.

KESIMPULAN

Arsip Puro Pakualaman tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga sebagai *collections of information, social communication, ... that require proscribed standards, protocols and procedures in order to protect, preserve, contextualize and provide access to information* (Parker dan Sloggett, 2011). Arsip Puro Pakualaman juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Yogyakarta agar tetap berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut terejawantahkan dalam nasihat Pangeran Natakusuma yang direkam dalam Babad Pakualaman jilid I bahwa “ing ngaurip denprayitna, ywa kelut maring memanis, kang tan cundhuk lawan nalar, yen tinrak mblaeni gedhe” (artinya: bersikap waspadalah dalam kehidupan ini. Jangan terhanyut oleh kata-kata indah yang bertentangan dengan akal sehat karena kalau sampai hal itu dilanggar akan mendatangkan marabahaya). Arsip, sebagaimana nasihat Pangeran Natakusuma tersebut, dicerminkan sebagai penjaga akal sehat manusia dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, arsip Puro Pakualaman wajib dilestarikan agar fisik dan informasi tetap dapat diakses hingga beberapa generasi mendatang.

Kerja sama pelestarian arsip di Indonesia masih didasarkan pada kerja sama formal, yaitu antar institusi pemerintahan. Bentuk kerja sama ini sudah seharusnya diperbaiki dengan melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk memaksimalkan hasil pelestarian arsip. Kewenangan lembaga kearsipan untuk mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan. Selain itu, tujuan akhir dari pelestarian arsip pun masih belum mampu menjawab makna penting dari pelestarian arsip itu sendiri. Kegiatan kerja sama pelestarian arsip hanya dimaknai sempit agar arsip tidak mudah rusak dan hilang isi informasinya. Arsip, sebagaimana ditegaskan oleh Parker dan Sloggett sebagai pemberdayaan suatu komunitas atau masyarakat lokal, belum menjadi tujuan utama dalam program pelestarian arsip.

Kerja sama pelestarian arsip yang telah dilakukan oleh Puro Pakualaman dan BPAD DIY telah berhasil menyelamatkan ratusan arsip yang terancam rusak dan hilang isi informasinya. Kerja sama tersebut juga mampu melibatkan pihak abdi dalem untuk mengelola arsip Puro Pakualaman secara mandiri. Program digitalisasi Puro Pakualaman sebagai inisiatif BPAD DIY juga mendapat sambutan baik dari pihak Puro Pakualaman. Digitalisasi arsip Puro Pakualaman pada akhirnya memudahkan pengguna untuk mengakses arsip milik Puro Pakualaman. Meski demikian, upaya kerja sama tersebut masih perlu dioptimalkan. Kesediaan Puro Pakualaman dan BPAD DIY untuk melibatkan pihak ketiga dalam memaksimalkan pengelolaan arsip-arsip hasil digitalisasi dinilai menentukan peningkatan nilai manfaat dari arsip-arsip tersebut. Arsip Puro Pakualaman, meski disebut sebagai arsip pribadi, juga memiliki nilai kesejarahan dalam membangun keistimewaan Yogyakarta. Nilai-nilai kesejarahan tersebut sudah sewajarnya diketahui oleh publik secara luas.

Kerja sama dalam upaya memperluas pemanfaatan arsip Puro Pakualaman juga dilakukan melalui transliterasi dan alih bahasa. Minimnya akses terhadap arsip Puro Pakualaman, salah satunya adalah pemahaman yang sangat minim dari pihak pengguna terhadap bahasa dan tulisan arsip. Arsip Puro Pakualaman, sebagaimana diketahui didominasi Bahasa Jawa dan Aksara Jawa. Minimnya tenaga ahli transliterasi dan alih bahasa menjadi kendala sampainya pesan arsip kepada pengguna. Puro Pakualaman dan BPAD DIY dapat melakukan kerja sama dengan para akademisi di beberapa perguruan tinggi maupun komunitas tertentu yang memiliki keahlian di bidang Sastra dan Bahasa Jawa. Kerja sama tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya mempublikasikan khasanah arsip yang disimpan di Puro Pakualaman. Semakin banyak arsip yang diakses di Puro Pakualaman, semakin memperluas pemahaman publik terkait tata sosial dan politik di Yogyakarta.

Optimalisasi kerja sama dalam hal sarana dan prasarana juga memiliki keterkaitan dengan kesiapan tenaga ahli dari lingkungan abdi dalem Puro Pakualaman dalam mengelola arsipnya secara mandiri. Anggaran pelestarian arsip Puro Pakualaman yang berasal dari dana keistimewaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pelestarian arsip. Apabila sarana dan prasarana dapat diperbaiki, minimal sesuai dengan standar Arsip Nasional RI (ANRI), maka harapan hidup fisik arsip Puro Pakualaman dapat lebih lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi. (2012). Strategi Preservasi Arsip Statis dalam Rangka Menjamin Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa pada Lembaga Kearsipan. *Jurnal Kearsipan ANRI* (7): 129-146
- Bettington, Jackie. (2008). *Keeping Archives*. Melbourne: Australian Society of Archivists Inc.
- Blouin, Francis X. dan William G. Rosenberg. (2010). *Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory*. Michigan: The University of Michigan Press
- Dong, Lorraine. (2011). The Economics and Politics of International Preservation Collaborations: a Malian Case Study. *Archival Science Journal* (12): 267-285
- Ellis, Judith. (1993). *Keeping Archives*. Melbourne: Australian Society of Archivists Inc.
- Ladiawati, Dewi. (2007). Pelestarian Arsip: Menyelamatkan Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Kearsipan ANRI* (2): 1-16.
- M.Qosim. <http://bpad.jogjaprovo.go.id/public/article/138/3a25d333822048cc88d9b3caa079a0af.pdf>. Accessed: 26 Januari 2016 (15:20).
- Novita, Risty Styra Nur, Inti Yunita Larasati, dan Ismi Sholatus Sholikha Eri Santi. (2008). Pengelolaan Arsip Statis di Puro Pakualaman Yogyakarta Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya. Tugas Akhir. Program Diploma Kearsipan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Parker, Lyndon Ormond dan Robyn Sloggett. (2011). Local Archives and Community Collecting In The Digital Age. *Archival Science Journal* (12): 191-212.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. (1985). *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhardi, Hardi dan Yayan Daryan. (1998). *Terminologi Kearsipan Indonesia*. Bandung: Sigma Cipta Utama.
- Suryodilogo, Atika, dkk. (2011). *Warnasari Sistem Budaya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta*. Yogyakarta: Trah Pakualaman Hudyana bekerjasama dengan Eka Tjipta Foundation dan Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. *Kearsipan*. 23 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta.